



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

09 – 10 Maret 2023



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

10 / 03 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	<p>Kamis, 09 Maret 2023</p> <p>https://www.kompas.com/properti/read/2023/03/09/170000721/target-pembiayaan-perumahan-mbr-naik-jadi-229.000-unit</p> <p>Target Pembiayaan Perumahan MBR Naik Jadi 229.000 Unit</p> <p>-</p> <p>Target penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada tahun 2023 naik jadi 229.000 unit senilai Rp 25,18 triliun. Sebelumnya, BP Tapera menargetkan penyaluran FLPP tahun 2023 hanya untuk 220.000 unit rumah dengan nilai yang sama. Sementara pada 2022, BP Tapera berhasil menyalurkan FLPP untuk 226.000 unit rumah senilai Rp 25,15 triliun.</p>	+
2	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	<p>Kamis, 09 Maret 2023</p> <p>https://www.cnbcindonesia.com/news/20230309214816-4-420458/garap-infrastruktur-kemen-pupr-kemenhub-kompak-andalkan-kpbu</p> <p>Garap Infrastruktur, Kemen PUPR-Kemenhub Kompak Andalkan KPBU</p> <p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono</p> <p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, di Kementerian PUPR total sebanyak 20 proyek dikerjakan melalui skema KPBU dari 48 proyek yang dijamin oleh PT PII melalui pembiayaan inovatif. Lebih dari Rp 200 triliun dari KPBU. Jadi kami tidak hanya melaksanakan yang ditugasi tiap tahun, tapi dari KPBU ada Rp 250 triliun lebih untuk 20 proyek. Sementara itu kemampuan APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya dapat memenuhi 30% atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.</p>	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

10 / 03 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

3	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	<p>Jumat, 10 Maret 2023</p> <p>https://www.cnbcindonesia.com/news/20230309215455-4-420459/pemerintah-dorong-peran-swasta-dalam-proyek-infrastruktur/amp</p> <p>Pemerintah Dorong Peran Swasta dalam Proyek Infrastruktur</p> <p>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</p> <p>Kementerian Keuangan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia mendorong skema pembiayaan inovatif untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Salah satunya adalah menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). PT PII memberikan Project Development Facility (Fasilitas Penyiapan Proyek/PDF) karena orang tidak bisa bilang mau bangun jalan tol, langsung KPBU, jadi. Tidak juga. Proyeknya seperti apa, dari teknikal, social, environmental, sampai ke financial.</p>	+
---	--	---	---



09 / 03 / 2023

Sumber: Kompas.com

Target Pembiayaan Perumahan MBR Naik Jadi 229.000 Unit

Penulis: Aisyah Sekar Ayu Maharani

Editor: Hilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Target penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada tahun 2023 naik jadi 229.000 unit senilai Rp 25,18 triliun.

Sebelumnya, BP Tapera menargetkan penyaluran FLPP tahun 2023 hanya untuk 220.000 unit rumah dengan nilai yang sama.

Sementara pada 2022, BP Tapera berhasil menyalurkan FLPP untuk 226.000 unit rumah senilai Rp 25,15 triliun.

FLPP merupakan dukungan fasilitas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tercatat hingga 6 Maret 2023, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP untuk 28.948 unit rumah senilai Rp 3,23 triliun.

Dalam pelaksanaannya BP Tapera bekerja sama dengan 40 bank penyalur yang terdiri dari 7 bank nasional dan 33 bank pembangunan daerah (BPD).

Sedangkan untuk pembiayaan Tapera, ditargetkan sebanyak 12.072 unit rumah senilai Rp 1,5 triliun bisa terealisasi tahun ini.

Realisasi pembiayaan Tapera dilakukan melalui 22 bank penyalur yang terdiri dari 6 bank nasional dan 16 BPD.

Tapera merupakan penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta Tapera secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang salah satunya hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan.

Per 6 Maret 2023, pembiayaan Tapera yang berhasil disalurkan adalah sebanyak 606 unit rumah senilai Rp 91,42 miliar.

Pada tahun 2022 lalu, pembiayaan Tapera yang berhasil disalurkan adalah senilai Rp 804,82 miliar untuk 5.380 unit rumah.

<https://www.kompas.com/properti/read/2023/03/09/170000721/target-pembiayaan-perumahan-mbr-naik-jadi-229.000-unit>



09 / 03 / 2023

Sumber: cnbcindonesia.com

Garap Infrastruktur, Kemen PUPR-Kemenhub Kompak Andalkan KPBU

Author: Khoirul Anam

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia tidak akan berhasil tanpa adanya sinergi atau kerja sama yang dilakukan oleh berbagai pihak.

PUPR pun ujarnya tidak akan sanggup mengerjakan proyek-proyek infrastruktur tanpa adanya dukungan pihak lain, salah satunya lewat pembiayaan inovatif dengan skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Saya (Kementerian PUPR) kalau tidak didukung, tidak akan bisa apa-apa. Semua hasil kerja sama kita. Kenapa bisa begini? Karena jiwanya kita harus kerja sama semua," ungkap dia dalam 13th Anniversary of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, beberapa waktu lalu.

Ia menyebut skema KPBU telah membuat kegiatan pembangunan proyek infrastruktur menjadi tanggung jawab besar bersama, karena akan diawasi oleh banyak pihak, termasuk Kementerian Keuangan.

Dia menjelaskan, di Kementerian PUPR total sebanyak 20 proyek dikerjakan melalui skema KPBU dari 48 proyek yang dijamin oleh PT PII melalui pembiayaan inovatif.

"Lebih dari Rp 200 triliun dari KPBU. Jadi kami tidak hanya melaksanakan yang ditugasi tiap tahun, tapi dari KPBU ada Rp 250 triliun lebih untuk 20 proyek. Dan yang sekarang sudah selesai," jelas Basuki.

Diketahui pembiayaan inovatif adalah salah satu upaya untuk mengatasi anggaran pemerintah yang terbatas dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Salah satu pembiayaan alternatif yang dilakukan adalah dengan menggunakan skema KPBU.

Sementara itu kemampuan APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya dapat memenuhi 30% atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menjelaskan, skema KPBU menjadi penting karena adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu kata dia, Kementerian Keuangan sudah berlaku adil dalam mengalokasikan APBN untuk masing-masing kebutuhan, termasuk infrastruktur.

Diketahui pembiayaan inovatif adalah salah satu upaya untuk mengatasi anggaran pemerintah yang terbatas dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Salah satu pembiayaan alternatif yang dilakukan adalah dengan menggunakan skema KPBU.



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

09 / 03 / 2023

|

Sumber: cnbcindonesia.com

Sementara itu kemampuan APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya dapat memenuhi 30% atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menjelaskan, skema KPBU menjadi penting karena adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN). Meski begitu kata dia, Kementerian Keuangan sudah berlaku adil dalam mengalokasikan APBN untuk masing-masing kebutuhan, termasuk infrastruktur.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230309214816-4-420458/garap-infrastruktur-kemen-pupr-kemenhub-kompak-andalkan-kpbu>



10 / 03 / 2023

Sumber: cnbcindonesia.com

Pemerintah Dorong Peran Swasta dalam Proyek Infrastruktur

Author: Khoirul Anam

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia mendorong skema pembiayaan inovatif untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Salah satunya adalah menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Diketahui skema KPBU mengajak badan usaha untuk turut berpartisipasi dalam proyek infrastruktur di Indonesia. Peran swasta pun diperlukan sebagai solusi ketertinggalan penyediaan infrastruktur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Terlebih dalam pembangunan proyek infrastruktur memakan waktu yang cukup panjang, meliputi penyusunan ide hingga persiapan penggarapan.

"PT PII memberikan Project Development Facility (Fasilitas Penyiapan Proyek/PDF) karena orang tidak bisa bilang mau bangun jalan tol, langsung KPBU, jadi. Tidak juga. Proyeknya seperti apa, dari teknis, social, environmental, sampai ke financial," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam 13th Anniversary of PT PII, yang digelar beberapa waktu lalu.

Sri Mulyani menyebut bahwa fasilitas tersebut (PDF) saat ini belum diberlakukan bagi pihak swasta yang bersedia mendukung proyek infrastruktur. Namun dia mengaku akan meninjau lebih lanjut mengenai PDF tersebut.

"Swasta bolehkah PDF? Mungkin nanti kita lihat. Kalau memang swasta boleh, itu solusi dua hal yang berbeda. Proyek itu dipropose oleh swasta yang mendevlop sendiri. Sehingga levelnya bisa dilihat," jelas Sri Mulyani.

Sebagai informasi, PDF merupakan fasilitas yang disediakan Kementerian Keuangan untuk membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK. Khususnya dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan (*financial close*).

Di samping PDF, instrumen lain yang dapat mendorong pihak swasta terlibat dalam proyek infrastruktur adalah *availability payment*. Dalam hal ini pihak swasta sudah mendapat jaminan imbal hasil dari infrastruktur yang telah mereka bangun.

Dia mencontohkan *availability payment* akan diberikan ketika pihak swasta mengembangkan jalan tol dan trafik penggunaanya tidak sesuai atau proyek kereta api yang jumlah penumpangnya tidak memenuhi ekspektasi.

"Jadi, kalau ada salah satu proyek, katakanlah Rp 1 triliun, si swasta yang mendanai sudah tahu *return*-nya berapa, katakanlah Rp 12 triliun. Jadi dia tahu bahwa akan ada kembali 1 triliun sampai 15-20 tahun. Kalau uangnya tidak kembali, itu harus ada yang menjamin, ini



**KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

10 / 03 / 2023

|

Sumber: cnbcindonesia.com

disebut *available payment*," papar Sri
Mulyani.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230309215455-4-420459/pemerintah-dorong-peran-swasta-dalam-proyek-infrastruktur/amp>